

# CATATAN KRITIS BUDAYA KEKUASAAN VERSUS ETIKA MODERN DALAM POLITIK INDONESIA<sup>1</sup>

Fachry Ali

## I

Seperti terjangkiti pada semua penulis, selalu ada pertanyaan berkecamuk dalam hati tiap saya akan menulis sesuatu. Kecamuk ini kian kuat karena ketika makalah ini ditulis, saya tengah mengedit terjemahan bahasa Inggris karya saya tentang Tanri Abeng setebal 500 halaman. Maka, kecamuk pertanyaan tentang “apakah saya memberikan, jika bukan ‘baru’, makna tertentu dalam setiap tulisan” kian menekan. Maka, ketika mulai menulis makalah ini, saya terkungkung oleh sergapan pertanyaan tersebut.

Sepanjang belum melaksanakannya, pertanyaan itu biasanya terbawa ke mana saya pergi. Kali ini, ia terbawa ke restoran Cina Muslim di Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan pada sore yang cerah, 23 Februari 2020. Lama menunggu pesanan datang, saya keluar. Di kursi-kursi yang khusus disediakan untuk perokok, saya duduk. Di hadapan saya sederetan gedung-gedung megah memamerkan diri. Ketika melayangkan pandangan ke gedung tertinggi yang menempelkan angka “88” di puncaknya, mata saya terpergok pada sebuah layang-layang. Tak mampu terbang bahkan hingga setengah dari ketinggian gedung tersebut, layang-layang itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Selang beberapa menit kemudian, saya melihat layang-layang itu terbang rendah di belakang deretan gedung-gedung yang lebih pendek. Saya memperkirakan di balik deretan gedung-gedung yang lebih pendek itu terdapat perkampungan penduduk dari mana layang-layang itu berasal. Dan, mungkin sekitar 3 atau 4 menit kemudian, layang-layang itu tampak melayang tak terkendali. Dalam pengalaman saya, itu menunjukkan bahwa layang-layang tersebut telah terputus dari talinya.

Bahkan sampai sekarang saya masih menggemari bermain layang-layang. Karena itu timbul “nafsu” saya berkisah lebih lanjut tentang pengalaman ini di dalam makalah yang sedang saya tulis. Namun sadar waktu dan tempat tidak memadai, niat yang mungkin dianggap “iseng” ini saya urungkan. Kini saya berkonsentrasi pada usaha menciptakan pertanyaan yang mempunyai makna terhadap fenomena yang saya lihat itu. Apakah kehadiran layang-layang di tengah deretan gedung-gedung yang mewah itu mencerminkan hadirnya sebuah diskrepansi? Saya ingin menjawab “iya”. Setidak-tidaknya jawaban semacam itu berangkat dari kontras pemandangan itu

---

<sup>1</sup> Tulisan, dalam bentuk makalah, pernah disampaikan dalam Kajian Etika dan Peradaban Paramadina ke-16, 26 Feb 2020.

sendiri. Bukankah layang-layang itu merefleksikan sisa kehidupan masa lalu? Bukankah kehadiran gedung-gedung mewah itu merefleksikan kekuatan modal yang terkonsolidasi secara, dalam konteks wilayah Kuningan, Jakarta Selatan itu, besar-besaran?

Yang menarik, jauh kalah dengan jumlah gedung mewah yang berderet-deret itu, layang-layang tersebut justru terbang tersendiri. Bukankah ini menggambarkan perubahan radikal ketika elemen lama, yang disimbolkan dengan kehadiran layang-layang itu, kalah bersaing dengan jumlah gedung-gedung mewah tersebut yang mensimbolkan elemen baru? Ironisnya, walau secara ekonomis harga layang-layang berikut benang dan mungkin berikut gelasannya, jauh lebih murah dibandingkan dengan gedung-gedung tersebut, pemandangan yang terpergok tetap memperlihatkan kepincangan di mana produksi bangunan-bangunan berbeton itu jauh lebih banyak daripada layangan tersebut. Sebuah ironi yang bahkan tak terbandingkan dengan judul buku karya Michael Gold, *Jews Without Money*.<sup>2</sup> Bagaimana bisa dipahami Yahudi miskin?

## II

Saya ingin menyimpulkan bahwa pemandangan yang baru terlukis di atas menggambarkan *the triumph of capital over the people* (kemenangan modal atas manusia). “Kemenangan modal” ini bukan saja dicerminkan oleh sepiunya tampilan layang-layang yang direproduksi rakyat jelata di tengah-tengah deretan gedung mewah, melainkan juga tercermin pada “pelayanan” manusia terhadap “onggokan konstruksi modal” tersebut. Sambil mengepulkan asap rokok, saya menyaksikan anggota-anggota *security* yang dengan takzim menjaga lalu lalang kendaraan yang masuk dan keluar gedung-gedung tersebut. Fenomen ini, walau tampak biasa, mengungkapkan betapa berharganya kehadiran “onggokan konstruksi modal” berbentuk gedung-gedung mewah itu. Ini kontras dengan perumahan-perumahan rakyat kampung di belakang deretan-deretan gedung-gedung mewah tersebut yang terserak tak sistematis dan tanpa penjagaan.

Tentu di dalam konteks sejarah, kehadiran konsolidasi modal yang tergelar di kawasan Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan itu bukanlah kelanjutan dari apa yang disebut sejarawan Marxist Hobsbawn sebagai *the Age of Capital* (Abad Modal) di Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung sepanjang 1848-1875.<sup>3</sup> Periode ini memang bertepatan dengan masa dan berakhirnya Sistem Tanam Paksa (1830-70) di Indonesia. Maka, ketika pemerintah kolonial Belanda melaksanakan *open door policy* (kebijakan pintu terbuka) seiring dengan berakhirnya Sistem Tanam Paksa pada 1870, modal Eropa dan AS yang terkonsentrasi dalam periode itulah yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akan, tetapi, modal yang tersebar pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 itu, seperti digambarkan G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne dalam *Western Enterprise in Indonesia and Malaya*, lebih diekspresikan ke dalam *plantation*

---

<sup>2</sup> Michael Gold, *Jews Without Money* (New York: Publicaffairs, 2009).

<sup>3</sup> E. J. Hobsbawn, *The Age of Capital 1848-1875* (London: Abacus, 1977).

*system and extractive system* (sistem perkebunan dan pertambangan).<sup>4</sup> Sebagai akibatnya, karena perkebunan dan pertambangan pada umumnya dikembangkan di wilayah luas tak berpenduduk, maka betapapun massif ekspresinya tak akan bertumbukan dengan daerah padat penduduk yang pada umumnya berada di wilayah perkotaan.

Tentu saja, sebagaimana didukung fakta historis, ekspansi massif dunia modal barat kewilayah-wilayah luas tak berpenduduk itu tidak menjamin tak terjadinya bentrokan kemanusiaan. Laporan Vitalis pada 1851 dengan terang menggambarkan bagaimana besarnya tragedi kemanusiaan sebagai akibat dari ekspansi modal melalui Sistem Tanam Paksa.<sup>5</sup> Kendatipun demikian, ekspresi modal tersebut tetap bersifat *agricultural-based and extractive-based*. Karena itu, ekspansi modal tersebut hanya mempunyai pengaruh minimal terhadap produksi gedung-gedung mewah di wilayah perkotaan.

Dalam beberapa hal, wilayah perkotaan, merupakan efek samping ekspansi modal. Setidak-tidaknya inilah yang dinyatakan oleh Keng Swee dalam “Economic Development and Modernization in South-East Asia”.<sup>6</sup> Dalam konteks sejarah struktural, konsolidasi modal yang mengarah kepada kapitalisme memang berasal dari wilayah pedesaan Inggris ketika *landlords* (tuan-tuan pemilik tanah luas) melakukan apa yang disebut *enclosure revolution* (revolusi pemagaran). Dengan tindakan ini, mereka melarang rakyat memanfaatkan properti tersebut karena dikonsentrasikan untuk tujuan komersial. Meningkatnya produksi tanaman ekspor dan bahan kain wool—sebagai akibat pemanfaatan lahan untuk tujuan komersial Inggris abad ke-15— inilah cikal-bakal konsolidasi modal bersifat kapitalisme.<sup>7</sup> Ini menunjukkan bahwa konsolidasi modal lebih berasal dari wilayah pedesaan daripada perkotaan. Dalam uraiannya tentang perkotaan atau kota, Max Weber, sosiolog Jerman terkenal, memang menjelaskan adanya unsur modal yang tumbuh di wilayah perkotaan, seperti digambarkan dalam “The Nature of the City”. Akan tetapi tak ada penjelasan bahwa kota menjadi sumber utama tumbuhnya modal yang mempunyai kemampuan ekspansi bersifat massif.<sup>8</sup> Ringkasnya, ekspansi modal asal barat abad ke 18 sampai ke awal abad 20 bersifat *nonurban-based* (bukan bertumpu pada kota).

Pertanyaannya adalah darimana sumber *urban-based capital expansion* (ekspansi modal di kawasan perkotaan) seperti terlihat di Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan? Saya memperkirakan ini ada kaitannya dengan apa yang digambarkan Robison dalam karyanya *Indonesia: The Rise of Capital*.<sup>9</sup> Dalam tesisnya itu Robison menyatakan bahwa negara Orde Baru,

---

<sup>4</sup> G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1962).

<sup>5</sup> L. Vitalis, “The System of Forced Cultivation in Java, 1851”, dalam Chr. L. M. Penders, (Compiler and Editor), *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942* (Queensland: The University of Queensland Press, 1977), hlm 22-30.

<sup>6</sup> Goh Keng Swee, “Economic Development and Modernization in South-East Asia”, dalam Hans-Dieter Evers, (ed.), *Modernization in South-East Asia* (Singapore and Oxford: ISEAS and Oxford University Press, 1975), hlm. 81-96.

<sup>7</sup> Ellen Meiksins Wood, *The Origin of Capitalism: A Longer View* (London: Verso, 1999).

<sup>8</sup> Max Weber, “The Nature of the City”, dalam Max Weber, *The City* (New York and London: The Free Press, 1958), hlm, 65-79. Saya berterimakasih kepada Dr. Abdul Aziz, mantan anggota KPU yang telah menunjukan buku ini.

<sup>9</sup> Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Undwin, 1985).

oleh kondisi struktural tertentu, telah bertransformasi menjadi agen pencipta kekayaan. Ini dimungkinkan karena sepanjang kemerdekaan di bawah sistem politik liberal (1945-59) dan di bawah Soekarno (1959-68), perekonomian Indonesia masih melanjutkan apa yang disebut sebagai *colonial mode of production* (moda produksi kolonial). Ini terutama ditandai oleh dominannya ekspor hasil pertanian dan ekstraktif tanpa diikuti oleh industrialisasi. Sebuah situasi apa yang disebut Geertz *urbanization without industrialization* (urbanisasi tanpa industrialisasi).<sup>10</sup>

Sebagai akibatnya, ketika rezim Orde Baru mengontrol negara sejak 1968, tak ada modal yang terkonsolidasikan pada tingkat domestik secara memadai untuk mendukung konsep dan program pembangunan baru: kapitalisme. Inilah kondisi struktural yang mendorong negara mengambil peran penting di tengah-tengah masyarakat melalui pengintegrasian diri ke dalam dunia kapitalisme global. Integrasi ini terutama ditandai oleh penyesuaian undang-undang investasi dalam dan luar negeri sebagai sikap akomodatif terhadap modal, terutama yang berasal dari asing —di bawah kontrol gabungan negara-negara kapitalis Barat, lembaga-lembaga internasional dan aktor-aktor swasta global. Inilah, antara lain, yang dimaksudkan dengan frasa negara sebagai “agen pencipta kekayaan”. Karena dengan kebijakan itu, negara berhasil membujuk datangnya hamburan modal ke Indonesia. Tindakan negara ini berjalan seiring dengan *intellectual discourse* tentang visi pembangunan pada tingkat global. Yaitu kesediaan aktor-aktor global untuk menjadi mitra (*partners*) dalam pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara berkembang —seperti tercermin dalam laporan B. Pearson.<sup>11</sup> Jalinan kedua hal ini, peran negara yang mampu membujuk datangnya modal serta kesediaan aktor-aktor global menjadi pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan, telah menghadirkan modal untuk pembangunan ekonomi yang sebelumnya tak tersedia pada tingkat domestik.

Proses struktural inilah yang membuat negara di masa Orde Baru menjadi sangat kuat. Posisi dominan negara ini bukan saja terjadi dalam berhadapan dengan kekuatan sosial-politik pada tingkat domestik, melainkan, seperti diperlihatkan studi Winters, bahkan, pada suatu saat, terhadap para pemilik modal global itu sendiri.<sup>12</sup> Dalam posisi yang sangat independen inilah negara punya kesempatan menciptakan rekayasa versinya yang tersendiri tentang wujud ekspresi modal dan struktur sosial di bawah kendalinya. Sebagai contoh sederhana, kita kutip apa yang disampaikan Robison:

*The state has taken several moves to assist the private capitalist to undertake some of these major investment responsibilities. The regulating interest rates and eliminating credit ceilings for domestic commercial banks was designed to release domestic*

---

<sup>10</sup> Clifford Geertz, *Agricultural Involvement: the Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1963).

<sup>11</sup> Lester B. Pearson, *Partners in Development: Report of the Commission on International Development* (New York, Washington, London: Praeger Publishers, 1969).

<sup>12</sup> Jeffrey A. Winters, *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1996). Saya berterimakasih kepada Suharso Monoarfa yang telah memperkenalkan karya ini.

*financial capital. State projects have also been transferred to private investors. The state has allowed private participation in the Cilegon cold rolling steel mill. Four cement plants at various stages of construction have been offered to the private sector and several state-owned agricultural projects are to be offered to private purchasers.*

Negara telah mengambil beberapa tindakan untuk menolong kaum kapitalis swasta mengambil tanggungjawab utama investasi. Pengaturan tingkat suku bunga dan penghapusan batas kredit untuk bank komersial domestik dirancang untuk menyalurkan dana modal domestik. Proyek-proyek negara juga dipindahkan kepada investor swasta. Negara mengizinkan partisipasi swasta dalam pabrik baja Cilegon. Pembangunan tiap tahap empat pabrik semen telah juga di tawarkan kepada pihak swasta dan beberapa proyek BUMN pertanian juga ditawarkan kepada pembeli swasta.<sup>13</sup>

Untuk ringkasnya, kurang lebih, kebijakan yang mirip dengan gagasan John Maynard Keynes<sup>14</sup> inilah “asal-usul” *the urban-based capital accumulation and expansion* (akumulasi dan ekspansi modal di wilayah perkotaan) hasil kreasi negara Orde Baru. Yaitu, sebuah proses penciptaan kekayaan kombinasi dari aktivitas usaha swasta dan industri manufaktur —berdasarkan modal yang datang dari luar negeri. Sejak itu, kekayaan Indonesia berkembang pesat tanpa preseden. Catatan Didin Damahuri dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa sampai 1996, Indonesia telah menjelma sebagai negara industri manufaktur terbesar dunia setelah Korea Selatan.<sup>15</sup> Walau tentu ekspor sektor pertanian dan ekstraktif tetap berlanjut, kehadiran massif industri manufaktur telah “mengakhiri” sifat *colonial mode of production* dalam perekonomian Indonesia. Memudarnya sifat *colonial mode of production* inilah yang memberi dasar struktural *urban-based capital expansion*.

Yang membuat kota kian menjadi tumpuan ekspansi modal adalah perkembangan *financial regime* pada tingkat global. Di dalam regim ini, pasar modal yang dimotori New York Stock Exchange (NYSE), berpusat di Wall Street, New York, telah mengambil alih basis penciptaan kekayaan dari sektor riil ke sektor finansial. Ini ditandai oleh skala perdagangan saham NYSE yang mencapai nilai 1 atau 2 triliun dollar AS perhari —jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan sektor riil.<sup>16</sup> Kian dominannya sektor keuangan atas sektor riil inilah yang mendorong ekspansi Deutsche Bank, raksasa perbankan Jerman, setelah runtuhnya tembok Berlin pada 1989, ke beberapa negara lain. Walau menolak terintegrasi ke dalam jaringan Wall Street, Deutsche Bank melihat pasar global yang distrukturkan regim finansial dewasa ini jauh lebih menguntungkan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, hlm. 389-390.

<sup>14</sup> Lihat John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (San Diego, New York and London: Harvest Book Harcourt Inc., 1964 [1953]).

<sup>15</sup> Prof Dr. Didin S Damahuri, Drs Ahmad Zacky Siradj, Dr Saafroodin Bahar, Prof M Firdaus, Ph.D., Drs Fachzenil Jannis, Auhadilah Azizy, M.Si., Eko Listyanto MSE dan Dr P. Setia Lenggono M. Si., *Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 103.

<sup>16</sup> Tentang Wall Street, lihat Richard Roberts, *Wall Street: The Markets, Mechanism and Players* (London: The Economist, 2002).

<sup>17</sup> David Enrich, *Dark Tower: Deutche Bank, Donald Trump, and An Epic Trail of Destruction* (New York: HarperCollins Publisher, 2020), hlm. 42-43.

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, pengaruh rezim finansial ini, juga terproyeksikan ke Indonesia —melalui penghidupan kembali pasar modal dan kebijakan liberalisasi perbankan.<sup>18</sup> Semua proses struktural ekonomi ini kian membuat kota menjadi tumpuan konsentrasi, konsolidasi dan ekspansi modal.

Inilah, saya kira, yang menjelaskan kontras antara layang-layang yang melayang sepi di tengah jejeran gedung-gedung mewah kawasan Casablanka, Kuningan, Jakarta Selatan —yang saya saksikan pada sore yang cerah, 23 Februari 2020.

### III

Di mana letak dilema etis dari ini semua? Di atas telah disebutkan bahwa kemunculan massif gedung-gedung mewah di Casablanka dan juga di berbagai tempat lainnya adalah refleksi *the triumph of capital over the people*. Pada tingkat global, kemenangan modal yang direfleksikan pada kian dominan rezim finansial telah memakan korban: Wright Patman, anggota Kongres AS yang menjadi ketua Komite Perbankan dan Keuangan yang telah terpilih sejak 1928. Oleh gerakan apa yang disebut *Red Guard of the Revolution* yang, pada 1975, berdemonstrasi untuk menjatuhkan “tokoh gayek” ini. Alasan utamanya adalah bahwa Patman telah menjadi penghalang utama “reformasi” perekonomian AS pasca runtuhnya kekuasaan Richard Nixon. Dalam kenyataannya, Patman adalah:

*“[the] living embodiment of an American tradition, the last populist... Patman had fought concentrated financial power and monopolies, part of a politics that stretched back to the founding of the country”*

Jelmaan tradisi Amerika yang masih hidup, pendukung kebijakan populis terakhir... Patman telah berjuang melawan kekuasaan finansial yang terpusat dan monopoli, bagian dari politik yang berkaitan dengan pendirian negara di masa lalu.<sup>19</sup>

Patman, betapapun kuat posisinya sebagai anggota Kongres AS sejak 1928, harus terjungkal melalui demonstrasi aktivis *Red Guard of the Revolution*. Apa yang tak disadari para aktivis ini adalah bahwa mereka telah dimanipulasi para kaum liberalis yang menghadirkan dominannya regim finansial atas sektor riil.

Jika Patman, kendatipun anggota kongres AS runtuh, apalagi rakyat biasa. Fenomen layang-layang yang melayang di tengah-tengah deretan gedung-gedung mewah di atas memperlihatkan kekalahan rakyat atas ekspansi modal di atas wilayah perkotaan. Secara spekulatif, dapatlah dikatakan sejak rekayasa ekspresi modal negara Orde Baru, artikulasi politik

---

<sup>18</sup> Tentang hal ini, lihat, antara lain, Widigdo Sukarman, *Liberalisasi Perbankan Indonesia: Suatu Telaah Ekonomi-Politik* (Jakarta: KPG, 2014).

<sup>19</sup> Matt Stoller, *Goliath: The 100-Years War between Monopoly Power and Democracy* (New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi: Simon & Schuster Paperbacks, 2019), hlm. viii.

Indonesia berubah secara drastis dari yang sebelumnya berdasarkan ideologi dan percaturan pemikiran, apa yang disebut Geertz sebagai *the politic of meaning*,<sup>20</sup> kearah *material based politics* (politik berdasarkan kekayaan). Akan tetapi, ekspresi murni *the material based politics* baru tampil dominan pasca Orde Baru. Di masa Orde Baru, politik material atau kekayaan, memang telah memainkan peran *decisive* (penting). Keberhasilan Orde Baru pada dasarnya adalah memenangkan dukungan rakyat dengan menggelar kemakmuran material. Pertumbuhan dan perkembangan kelompok-kelompok bisnis raksasa adalah salah satu refleksi dari usaha ini. Dengan menggunakan konsep *trickle down effect* (efek menetes kebawah), kemajuan usaha-usaha bisnis raksasa swasta menciptakan lapangan pekerjaan tersendiri yang secara otomatis menyerap tenaga kerja secara massif. Dan secara tidak langsung, telah terjadi proses didistribusi pendapatan dalam skala yang lebih luas. Kendatipun harus diterima kenyataan bahwa pertumbuhan kekayaan kaum swasta raksasa jauh berlipat ganda dibandingkan kekayaan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Hal yang fundamental adalah negara, yang mereproduksi para pengusaha swasta raksasa tersebut, tetap memegang kontrol atas mereka. Dalam arti kata lain, para pengusaha konglomerat tersebut tetap tergantung secara politik kepada negara.

Inilah yang membedakan politik Indonesia pasca Orde Baru. Raksasa pengusaha swasta yang telah terlanjur kaya di masa Orde Baru menjadi kelompok independen tanpa harus tergantung pada negara. Pada saat yang sama, sistem politik Indonesia berubah dari totalitarian kepada demokrasi. Sampai pada titik ini ekspresi *material based politics* terjadi secara hampir murni. Di satu pihak, di dalam sistem demokrasi, bermunculan partai-partai politik. Akan tetapi artikulasi politik mereka tidak didukung oleh kekuatan material. Ini terutama terjadi, karena sebagian besar pendiri partai-partai politik tersebut tidaklah berasal dari kalangan yang terlanjur kaya di masa Orde Baru. Oleh karena itu, terutama dengan tingginya biaya politik di dalam sistem demokrasi, para pendiri partai-partai politik tersebut secara langsung atau tidak harus mengandalkan hubungan mereka dengan sumber-sumber kekayaan, yaitu pengusaha swasta raksasa yang sudah terlanjur kaya di masa Orde Baru. Pada saat yang sama, *the material based politics* ini ditandai oleh “migrasi modal” ke dalam dunia politik. Ini ditandai oleh terintegrasinya para pemodal besar menjadi aktivis di dalam partai-partai politik yang telah ada. Integrasi ini, sedikit banyak mempengaruhi secara konstruktif survivalitas finansial partai tersebut. Dalam arti bahwa aksi politik yang dilakukan memperoleh dukungan finansial. “Migrasi modal ke dalam dunia politik” ini juga terjadi ketika para pengusaha swasta yang sudah terlanjur kaya di masa Orde Baru, mendirikan partai-partai politik tersendiri. Dengan demikian, mereka menjadi jauh lebih absah berpartisipasi di dalam politik demokrasi.

Sampai di sini kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana: apakah yang terutama melandasi politik Indonesia dewasa ini? Jawaban normatif adalah Pancasila dan “kearifan budaya politik tradisional”. Sebagaimana acap diungkapkan pada tingkat publik, keduanya dianggap diperlukan menata tingkah laku politik Indonesia. Dengan ini, identitas ideologi dan budaya

---

<sup>20</sup> Clifford Geertz, “Afterwords: The Politic of Meaning”, dalam Claire Holt, Benedict R. O’G. Anderson and James Siegel, *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972) hlm. 319-336.

bangsa bisa terjaga dari proses teralienasi akibat arus radikal proses modernisasi. Suatu gejala tak hanya menimpa masyarakat Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya. Melainkan, seperti yang ditunjukkan studi Nathaniel dan kawan-kawan, juga atau bahkan menghegip masyarakat Amerika yang, sebagai akibatnya, mendorong tingginya tingkat penerimaan agama di tengah-tengah masyarakatnya.<sup>21</sup> Pekik “patriotisme” yang dilancarkan pejabat-pejabat negara dan berbagai kelompok masyarakat (termasuk yang berasal dari agama) dewasa ini, di dalam beberapa hal memperkuat sinyalemen ini. Akan tetapi, saya khawatir yang terjadi adalah sebuah proses konservasi seperti dialami karya-karya sastra Romawi kuno. Karya-karya sastra yang sebelumnya berfungsi sebagai penguat “patriotisme”, hanya menjadi lantunan “penghibur”. Kita kutip Edward Ch. L. Van Der Vliet:

*Tyrtaeus, Solon, Alcaeus, Theognis and others composed their verses to sing them and to have them recited in public. That was also one of the main rituals of the symposia, the meeting of predominantly aristocratic ‘clubs’ of ‘friends’, and in that way poetry was used to instruct the young. This was living poetry, and its contents were and remained of common and communal interest long afterwards. But with words and images these poets used they directly referred to the epic tradition. For both, singer and listener, that tradition provided a shared frame of reference, even if metric form and subject and point of view of the new poetry were different. When Tyrtaeus calls to remain steadfast in the midst of fighting, the scenery of battle he evokes is often very similar to situations described in Homer’s Iliad. In the Homeric epics too an ideal is represented of an orderly society where justice and self-restraint prevail and which apparently closely resembles that of the classical polis. The Homeric epics were the product of a much older and different oral tradition, one in which extended songs were continuously adapted to the expectations and imaginings of the (participating) public, and thus underwent changes (although they were thought to remain unchanged). But in the archaic age their life had passed. About the end of the eighth or the beginning of the seventh century the Iliad and Odyssey were preserved and not to be lost while traditions and circumstances changed. Thus a living tradition was fossilised, to be recited in the future in this one and only form, in a clearly defined context, in contests of professional singers who had memorised them from writing. It has been argued that the main intention of the recording of the epics was to preserve the ideals of the aristocratic society in decline and to hand them down intact to later generations, at a time when the social preminence of the aristocracy, its style of life and its values, were affected by profound changes from which the polis society, the community of citizens, was to emerge.*

Tyrtaeus, Solon, Alcaeus, Theognis dan lainnya menyusun sajak-sajak mereka menyanyikan dan membacakan di muka umum. Sajak itu juga merupakan salah satu alat ritual simposium, pertemuan yang didominasi ‘klub’ kawan-kawan kaum bangsawan, dan dalam cara ini puisi digunakan untuk mengajari kalangan muda. Inilah

---

<sup>21</sup> Nathaniel D. Porter and Christopher D. Bader, “Pathways to Discovery and Enlightenment: Amazon’s Recommendation System as a Source of Information on Religious and Paranormal Consumption Patterns”, dalam Roger Finke and Christopher D. Bader, (eds.), *Faithful Measures: New Methods in the Measurement of Religion* (New York: New York University Press, 2017), hlm. 317-343.



puisi, berikut isinya yang terpakai dan tetap menjadi titik perhatian masyarakat. Akan tetapi, kata-kata dan gambar-gambar penyair gunakan secara langsung ini mengacu kepada tradisi kisah kepahlawanan. Karena baik bagi penyanyi dan pendengar, tradisi itu memberikan acuan yang sama, bahkan andai bentuk sajak dan subyek serta sudut pandangnya berbeda. Ketika Tyrtaeus menyerukan tetap tabah di tengah pertempuran, gelora medan perang yang ia bangkitkan sering sangat serupa dengan situasi yang digambarkan dalam Homer Iliad. Syair kepahlawanan Hommerik juga menggambarkan tatanan masyarakat yang teratur di mana keadilan dan sikap menahan diri sendiri berlaku seperti yang tampak jelas dan serupa dengan susunan polis klasik. Kisah kepahlawanan Hommerik adalah produk yang jauh lebih tua dan berasal dari tradisi oral berbeda, yang merupakan nyanyian panjang yang secara terus-menerus disesuaikan dengan harapan-harapan dan imajinasi publik sebagai pesertanya, dan (karena itu) condong berubah. Akan tetapi di masa purbakala kehidupan mereka telah berlalu. Sekitar akhir abad ke-8 atau di awal abad ke-7 SM, Iliad dan Odyssey diawetkan dalam bentuk tulisan, dan dengan ini bentuk mereka menjadi tetap, agar supaya bisa diawetkan dan tidak kehilangan ketika tradisi dan lingkungan berubah. Karena itu, tradisi yang sebelumnya terpakai menjadi membeku untuk kelak dibacakan dalam wujud yang sudah terawetkan dalam konteks tertentu, dalam perlombaan penyanyi profesional yang telah menghapuskannya dari teks tertulis. Alasan tujuan utama penulisan sajak kepahlawanan itu adalah untuk mengawetkan nilai-nilai kebangsawanan yang sedang merosot dan mewariskannya bulat-bulat kepada generasi selanjut, di mana ketika elemen-elemen utama kebangsawanan, gaya hidup dan nilai-nilainya dipengaruhi oleh perubahan mendalam dari mana masyarakat polis, komunitas warganegara, bangkit.<sup>22</sup>

Sengaja paragraf di atas saya kutip secara utuh agar kita menemukan makna yang dimaksud penulisnya. Bahwa bahkan tradisi dan karya-karya pemikiran dan wejangan yang pernah terpakai di masa jayanya terancam makna riilnya ketika struktur sosial berubah. Usaha pengawetan syair kepahlawanan (*epic*) Homer yang sebelumnya membangkitkan “patriotisme” kini, dalam bentuknya yang diawetkan, hanya menjadi bahan perlombaan “nyanyi” ketika struktur kebangsawanan yang menyangganya telah lenyap. Dalam arti kata lain, gagasan-gagasan yang terumuskan di masa lalu hanya akan hidup sepanjang maknanya sesuai dengan struktur sosial yang mendukungnya. Persoalannya adalah bahwa struktur sosial bukanlah sesuatu yang statis. Maka, dalam konteks Pancasila serta “kearifan budaya tradisional” di atas, jika kecenderungan politik atasnya lebih mengarah kepada pengawetan, bukan tidak mungkin pengalaman syair kepahlawanan Homer di masa Yunani Kuno bisa berulang.

Ini terutama, sebagaimana telah disampaikan, karena dalam realitasnya, struktur sosial masyarakat Indonesia dewasa ini lebih dipengaruhi oleh arus ekspresi kekuatan modal. Walau susunan kekuatan politik dominan sudah berubah, ditandai oleh mundurnya militer ke barak

---

<sup>22</sup> Edward Ch. L. Van Der Vliet, “Poetry and the Emergence of the *Polis*”, dalam Martin van Bakel, Renee Hagesteijn, Pieter van De Velde, (eds.), *Pivot Politics: Changing Cultural Identities in Early State Formation Processes* (Amsterdam: Het Spinhuis Publisher, 1994), hlm. 90-91.

sebagai indikasi berlakunya sistem demokrasi,<sup>23</sup> “inti praktek” demokrasi dewasa ini adalah *wealth-based politics*, yang fondasinya dibangun di masa Orde Baru. Akibatnya, struktur sosial serta imajinasi yang berlaku dan hidup adalah sesuatu yang diproyeksikan oleh kekuatan kekayaan material itu sendiri. Sebagai akibatnya, jauh dari yang diidealisasikan Pancasila dan “kearifan budaya tradisional”, struktur sosial dan arah perpolitik nasional jauh lebih dipengaruhi oleh sistem yang direproduksi oleh *the triumph of capital over the people*.

Dalam struktur yang semacam ini, layang-layang yang melayang di deretan gedung mewah Casablanka, Kuningan, Jakarta Selatan —sebagaimana disebut di awal makalah ini— benar-benar terputus dari benangnya tanpa mendapatkan perhatian. Yaitu, kalangan masyarakat yang tersingkir karena ekspresi *urban-based capital accumulation and expansion*. Sementara, deretan gedung mewah tersebut, sebagai simbol dari keunggulan kaum kaya dan *the triumph of capital over the people*, bukan saja kian kuat dan mentereng, melainkan selalu punya potensi bertambah baik dalam kuantitas maupun “kualitas”.

---

<sup>23</sup> Studi menarik tentang ini, lihat Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia After Soeharto* (Singapore: ISEAS, 2010), hlm. 127-190.